

TEORI DAN MODEL PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Telaah Historis Epistemologis - Model Pendidikan
Sejak Zaman Hindu Sampai Kemerdekaan

Imam Malik Masyhuri
Dosen STAIN Tulungagung

Abstrak

Secara epistemologis model pendidikan di Indonesia di bangun melalui tahapan setapak demi setapak. Model pendidikan paling awal diperkenalkan di Indonesia adalah model per-cantrik-an, model ini menempatkan pendidik (resi, master, ustadz) sebagai guru sekaligus pemimpin spiritual secara individu. Kedua, model pendidikan dalam bentuk padhepokan atau biara, model ini mendapat inspirasi model guru-kula dari India, dalam model ini kepemimpinan pendidikan mulai bersifat kelembagaan. Ketiga, model pendidikan pesantren, model ini mendapat inspirasi model persaudaraan Sufi, Kuttab, Ribat, dan Hankah yang dikombinasi dengan model pendidikan guru-kula yang diberi corak ke-Islam-an, pendidikan tidak hanya bersifat profan, melainkan juga sakral. Keempat, model persekolahan (schooling system), model ini dibawa ke Indonesia oleh kolonial Belanda, model ini mengacu pada desakralisasi peran pimpinan lembaga pendidikan. Kelima, model madrasah, model ini merupakan kombinasi antara model sekolah umum dengan model pesantren, jadi pelajarannya adalah materi umum yang bermuatan nilai-nilai agama Islam.

Keywords; model pendidikan, kepemimpinan, sejarah

Pendahuluan

Banyak sekali model pendidikan yang diperkenalkan di Indonesia, namun kebanyakan model pendidikan yang di tawarkannya tidak dibangun melalui fondasi yang berbasis pada epistemologi model pendidikan yang digali dari nilai luhur *kearifan lokal* negeri sendiri. Kegiatan yang dikembangkan belum berdasarkan kesinambungan informasi *kearifan-nasional* yang dikembangkan dari nilai-nilai dari hasil titik-temu peradaban di

Indonesia. Tidak sedikit tujuan pendidikan yang telah di rencanakan di negeri ini, namun tidak semuanya dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. Untuk mnghindari fenomena seperti di atas, penulis bermaksud mencari pilar-pilar model pendidikan Indonesia yang berdasarkan epistemologi pendidikan yang dibangun dari hasil akumulasi perkembangan model pendidikan Indonesia asli. Upaya ini dimaksudkan agar tidak terjadi kegagalan proses dan model pendidikan¹, seperti kegagalan tujuan out-put pendidikan yang telah terjadi pada seorang peserta didik yang bernama Adolf Hitler².

Tulisan ini selanjutnya bertujuan untuk menelusuri epistemologi model pendidikan di Indonesia sejak zaman hindu hingga zaman kemerdekaan. Kenapa demikian? Karena akar³ epistemologi model pendidikan adalah merupakan denyut jantung bagi perkembangan model pendidikan Indonesia di masa mendatang, adapun model pendidikan yang pernah ada di Indonesia adalah:

¹ Soal kegagalan ini dapat dijumpai dalam tulisan Paulo Freire dkk, Lihat Paulo Freire dkk, dalam pengantar bukunya yang telah diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi (2003), *Menggugat Pendidikan* Fundamentalis Konserfatif Liberal Anarkis, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hal. vii-lxv

² bahwa dari segi kualitas peserta didik, Adolf Hitler adalah murid yang rajin, jika ulangan tak pernah curang, hampir tak pernah mangkir dari sekolah, dan dirapornya selalu berderet huruf A. dia senang menggambar dan tak banyak berbicara, tak pernah bikin ulah, satu satunya keluhan dari gurunya bahwa si Adolf ini kurang total menyimak pelajaran, menurut mereka dia terlalu berbakat jadi penyair, pelamun dan pemimpi. Dari segi kualitas pendidiknya, para guru Adolf selalu memnyampaikan pesan-pesan yang positif, tak satupun yang dengan sengaja ingin mencetak Adolf menjadi mesin pembunuh massal. Masyarakat sekeliling Adolf juga telah memberikan apresiasi yang positif ketika melihat tahun demi tahun adolf selalu menampakkan bakat positif-kreatifnya. Lihat Paulo freire, *Ibid*.

³ Terutama ketika Adolf memasuki pendidikan akademi militer, anak penurut, taat berbakat dan pendiam, pemimpi dan pelamun, hanya karena setiap hari bergelut dengan urusan senapan, ternyata dikemudian hari menjadi mesin pembunuh massal yang sangat mengerikan. Bahkan dunia ternganga menghadapi kenyataan unik dari fenomena kegagalan itu, para pengajar, para pendidik terhenyak, masyaraakat terperanjat, mereka berteriak "lebih baik Adolf dirundung sebagai penyair berpuisi jelek ketimbang menjadi pemimpi bersenjatakan senapan. Aldof menjadi pemimpi bersenapan yang mengira dirinya titisan para dewa, yang ditugaskan menulis buku mengenai teorinya dengan tinta darah. Lihat Paulo Freire, *Ibid*..

Model Per-*Cantrik*-An (Hindu-Buda)

Sebelum pewarisan (transmisi) keilmuan praislam, di Indonesia sudah ada model transmisi keilmuan yang dilakukan melalui model per-*cantrik*-an yakni suatu model transmisi keilmuan secara individu (*individual transmission system*), model ini terjadi di wilayah Nusantara pada zaman Hindu-Budha awal, informasi demikian menurut Imron Arifin (1998) dapat dilihat dalam beberapa situs sejarah yang menunjukkan bahwa sejak ratusan tahun silam telah terjadi transmisi model per-*cantrik*-an di wilayah Jawa Timur terutama, Kabupaten Malang, Gresik dan Kediri, yang merupakan sentra kehidupan manusia. Menurut catatan sejarah, telah terjadi transmisi keilmuan yang di pimpin oleh para resi di Jawa Timur, misalnya di wilayah Malang pernah tepatnya di Tumapel, Kanjuruhan, Singasari, dan Sengguruh⁴.

Pada saat kerjaan Kanjuruhan ditegakkan oleh Gajayana sekitar abad ke-8, telah dilakukan transmisi keilmuan oleh seorang tokoh resi termasyhur bernama Agastya. Resi Agastya dianggap sebagai *guru-loka* di seluruh pulau Jawa.⁵ Ia menetap di Gunung Kawi.⁶ Salah seorang murid Resi Agastya yang terkenal keluasan ilmunya adalah Resi Trenawindu⁷ yang tinggal di Tumapel⁸. Melalui data-data di atas kebanyakan ahli pendidikan sebakat bahwa pewarisan ilmu dari Resi Agastya kepada Resi Trenawindu melalui model per-*cantrik*-an yakni suatu model transmisi (*transmission system*) keilmuan secara individu⁹. Selanjutnya perkembangan model pendidikan di Indonesia pada zaman Hindu itu terjadi penyesuaian dengan sitem yang berlaku di India

⁴ Lihat selengkapnya, dalam Imron Arifin, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Madrasah Ibtida'iyah dan Sekolah Dasar Berprestasi, Studi Multi Kasus pada MIN Malang I, MI Mamba'ul 'Ulum dan SDN Ngaglik I Batu di Malang*, Disertasi, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, Program Pascasarjana, Prodi Manajemen Pendidikan, 1998, 18-31.

⁵ Brahmana tertinggi (aliran Syiwa) yang dijadikan panutan oleh para Brahmana, Empu, dan Gguru yang ada pada masa itu. Lihat , Poerbatjaraka, 1992. Lihat selengkapnya dalam *Imron Arifin (1998),Kepemimpinan...: 7*.

⁶ 35 kilometer di sebelah barat kota Malang. Gunung ini bentuknya menyerupai patung Dewa Agastya yang sedang tidur, masyarakat Malang sering menyebutnya Gunung Putri Tidur.

⁷ Guru termasyhur lain di Tumapel adalah Empu Semeru, salah seorang dari Catur Brahmana. Empu Semeru dikisahkan pernah ke Bali untuk membantu Keluarga Besar Pasek Kayu Selem dan menjadi pendiri Pura Ratu Pasek di Besakih (Eiseman, 1989: 37).

⁸ Tumapel dewasa ini menjadi Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di tempat ini ditemukan dua situs candi peninggalan kerajaan Tumapel (Candi Singhasari dan Dwarapala), juga situs pemandian Kebon Agung atau Candi Watu Gede di Desa Watu Gede.

⁹ Lihat lebih lanjut, Imron Arifin (1998): 18, Poerbatjaraka, 1992: 63; Mulyana, 1979: 64; De Graaf & Pigeaud, 1985: 66.

yakni model *guru-kula*.¹⁰ Dalam model ini, pendidikan sudah dilembagakan dimana seorang guru berperan juga sebagai pimpinan lembaga pendidikan¹¹.

Pada awal abad ke-13 di Tumapel terdapat seorang guru Tantrayana yang masyhur yang bernama Empu Palot dan Dang Acarya Ratnamsah yang tinggal di Turyantapada.¹² Mereka berperan sebagai guru sekaligus pemimpin pendidikan¹³ yang sangat dihormati oleh rakyat dan Raja Majapahit.¹⁴ Pengaruh guru Tantrayana ini menyebar di sejumlah wilayah Tumapel sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Negarakretagama*¹⁵ meliputi sejumlah desa perdikan¹⁶ Wisynuistik di Batwan yang meliputi Batu¹⁷, Tanggulan, Dahulut, Galuh, Makalaran, Sedang, Medang, Hulun Hyang, Parung, Langge, Pasajen, Kelut, dan Andelmat. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan yang bercorak Hindu-Budha telah dikenal sejak berabad-abad di wilayah Jawatimur terutama wilayah Malang. Dalam model pendidikan tersebut guru tertinggi berperan pula sebagai pemimpin pendidikan yang sangat dihormati.

Model Guru-Kula (Zaman Islam Sinkretis)

Islam yang datang ke Jawa adalah Islam sufi yang dengan mudah diterima serta diserap ke dalam sinkretisme Jawa.¹⁸ Sejak awal, pusat-pusat pengembangan agama Islam berlangsung di pondok pesantren yang umumnya dipimpin oleh seorang guru tasawuf yang menjalani hidup sebagai seorang

¹⁰ Model ini merupakan pendidikan asrama yang disebut *Padhepokan*. Murid-murid tinggal serumah dengan guru. Murid harus melayani gurunya, karena dianggap sakti. Para guru sakti ini seringkali dibantu guru lain yang patuh di bawah kepemimpinannya.

¹¹ Lihat Djumhur dan Danasuparta 1976: dalam *Imron Arifin (1998), Kepemimpinan..*, 19.

¹² Turyantapada dewasa ini menjadi kota Turen, 26 kilometer di sebelah selatan kota Malang, Lihat Pandangan Brandes, sebagaimana dikutip Mulyana, 1979, hal: 8 .

¹³ Guru tertinggi ini adalah Budha disebut Mahayana yang banyak mengenal Bodhisattwa sebagai mediator mencapai nirwana.

¹⁴ Mulyana, S. *Negarakretagama dan Tafsir Sejarah*nya, (Jakarta : Bhartara, 1979), 312.

¹⁵ Mulyana, S. *Negarakretagama dan Tafsir Sejarah*nya, (Jakarta : Bhartara, 1979), 313.

¹⁶ Desa perdikan adalah desa yang dibebaskan dari pajak, karena penghuninya dibebani tugas memelihara suatu candi atau lembaga pendidikan seperti biara atau *padhepokan*.

¹⁷ Batu dewasa ini menjadi Kota Administratif Batu, 19 kilometer di sebelah barat laut kota Malang.

¹⁸ Peacock, C.L. *Furifying the Faith*. California, 1978.

sufi.¹⁹ Pesantren²⁰ sendiri pada dasarnya merupakan pencakokan dari pendidikan bermodel *padhepokan* yang berasal dari kebudayaan pra-Islam²¹.

Menurut Atjeh (1980) penyebar Islam pertama di Jawa yang mendirikan pesantren adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama dari Gujarat, India Selatan. Malik Ibrahim, dalam mengembangkan pesantrennya mengambil bentuk lembaga pendidikan yang sudah ada yakni model biara atau *padepokan* yang dipakai oleh para pendeta dan biksu dalam melakukan proses belajar dan mengajar.²²

Pengadaptasian bentuk biara dan *padhepokan* ke dalam pesantren tradisional secara tidak langsung telah mengambil bentuk model *guru-kula* dengan mengagungkan kyai sebagai guru yang hidup serumah dengan santri-santrinya.²³ Para kyai-seperti para resi-dianggap masyarakat memiliki pancaran mistik. Hal inilah yang melatari timbulnya konsep *karomah* dan *barokah* di pesantren tradisional yang menjadi dasar utama dari proses belajar-mengajar²⁴, yakni konsep yang tak populer di dunia Islam, terutama di Timur Tengah. Dengan adanya konsep *barokah* dan *karomah* yang berlaku di pesantren, maka kedudukan kyai sebagai guru utama sekaligus pemimpin lembaga pesantren menjadi sentralistik.²⁵ Figur pemimpin pesantren tidak

¹⁹ Atjeh, A. *Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf* (Solo : Ramadhani, 1980)

²⁰ Menurut Dhofir (1984) pesantren berasal dari akar kata *santri* yang mendapat tambahan kata *pe* dan *an* yang berarti tempat tinggal santri. Kata *santri* berasal dari kata Sankrit, *shastri* yang bermakna seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu (Berg dikutip Gibb, 1932; Chatuverdi & Tiwari, 1970; Geertz, 1981).

²¹ Syarif, M. *Administrasi Pesantren*. (Jakarta: Prayu Barkah, 1983).

²² Syis, Z.A., dkk. *Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren*, (Jakarta: Direjen Bimbaga Islam Depag RI, 1984)

²³ Mengenai proses adaptasi dari biara dan *padhepokan* menjadi pesantren ini, Geertz (1981) menandakan bahwa beberapa hal yang khas di pesantren mengingatkan orang pada biara Hindu-Budha, meski demikian santri bukanlah para pendeta. Menurut Stuterheim (1951) sejak abad ke-15, para kyai yang memimpin pesantren mendapat penghormatan tinggi dari masyarakat. Penghormatan ini pada dasarnya merupakan kelanjutan budaya (*cultural continuity*) dari apda resi di masa pra-Islam.

²⁴ Dhofier, Z. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1984)

²⁵ Kedudukan kepemimpinan lembaga pendidikan pesantren bersifat *emerging leadership* yaitu muncul dari komunitas masyarakat yang diyakini memiliki kelebihan dan kemampuan menonjol dalam bidang ilmu, agama, dan *akhlak al-karimah*. Pada masa kerajaan Demak dan Mataram para guru utama ini diakui sebagai pemimpin pendidikan formal yang terorganisasi dalam Bayangkare Islah. Mereka terklasifikasi atas Sunan, Kyai Ageng, Kyai Anom, Ustadz, Naib, dan Modin dengan diberi *Siti lenggah* (tanah ganjaran). Meskipun *Siti lenggah* dihapus ketika Belanda berkuasa, kedudukan kyai sebagai guru utama dan pemimpin pesantren

saja dianggap sebagai “gudang ilmu,” melainkan juga menjadi sandaran spiritual yang bisa mendatangkan berkah bagi murid yang patuh dan setia sekaligus mendatangkan laknat bagi murid yang tidak patuh dan berkhianat. Konsekuensi logis dari kedudukan guru spritual yang juga pemimpin pesantren, maka dibutuhkan prasyarat yang tidak ringan bagi seseorang untuk bisa menduduki posisi sebagai pemimpin sebuah pesantren tradisional. Sebab ia tidak saja disyaratkan memiliki kemampuan lebih di bidang ilmu pengetahuan agama melainkan juga harus memiliki kekuatan mistis dan kharisma serta wawasan yang luas guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar pesantren yang diasuhnya.²⁶

Model Pendidikan Formal (Kolonial Belanda)

Pertama kali lembaga pendidikan formal Indonesia didirikan tahun 1607 oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) menanamkan kekuasaan. Pada tahun 1607 itu, VOC mendirikan pendidikan formal Indonesia pertama di Ambon.²⁷ Menyusul pada tahun 1717, di pulau Jawa dibuka sekolah pertama kali di Batavia (sekarang Jakarta) dan berkembang menjadi 3 sekolah pada tahun 1736.²⁸ Menurut Kroeskamp (1974) pada awal berdirinya sekolah di Indonesia terjadi dualisme tujuan pendidikan, yaitu menyediakan sarana pendidikan bagi anak-anak Belanda,

tetap eksis di masyarakat, kedudukan ini terus berlanjut sampai sekarang, bahkan ditemukan sejumlah kyai yang memimpin pesantren sekaligus merangkap sebagai kepala sekolah dan atau rektor perguruan tinggi.

²⁶ Mansurnoor, I.A, *Ulama, Villages, and Change: Islam in Central Madura*. Disertasi tidak dipublikasikan. Montreal: The Institute of Islamic Study, McGill University, 1987), 299.

²⁷ Depdikbud, *Sejarah Pendidikan Indonesia dan Zaman ke Zaman* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), 42.

²⁸ Sekolah Belanda dengan mata pelajaran umum yang pertama di kota Malang didirikan sekitar tahun 1880, dinamakan *European Lager School* (ELS) Lihat Daulay, 1991. Pada 1881 dikembangkan di kota Turen. Pada 1920, didirikan *Holland Inlandsch School* (HIS) di kota Malang dengan menggunakan pengantar bahasa Belanda (Shaeffer, 1979). Sementara sekolah bagi pribumi pedesaan, baru didirikan sekitar tahun 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van heutz, dan jenis sekolah ini baru dibentuk di Malang sekitar tahun 1920-an (Asmadi, 1995). Sekolah desa itu disebut *Volkschool* (Sekolah Rakyat) yang menggunakan pengantar bahasa Jawa. Di kota Malang, lembaga pendidikan dasar untuk pribumi yang terkenal selain *Volkschool* adalah *Arjuno School* (sekarang menjadi SMPN di Jl. Sunandar Priyosudarmo) dan *Kartini School* (sekarang menjadi kompleks SMU Panjura dan MIJS serta gedung bioskop Kelud di Jl. Kelud; keberadaan sekolah ini menyebabkan daerah sekitarnya dinamakan Jl. Bareng Kartini), keduanya sekolah partikelir yang didirikan oleh pemerintah Belanda tetapi menggunakan guru-guru orang Indonesia dengan menggunakan bahasa campuran Jawa dan Belanda (Shaeffer, 1979).

dan menyebarkan misi keagamaan. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan pada masa awal berdirinya sekolah dipimpin oleh para pendeta (*schoolmaster/preachers*) yang juga memimpin upacara-upacara peribadatan di Gereja.

Perkembangan sekolah selama pemerintah Kerajaan Belanda mengalami peningkatan berkaitan erat dengan kebijakan bumiputera. Sejak tahun 1848 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Den Bosch, memberikan anggaran khusus untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi penduduk di pulau Jawa sebesar f 25.000. Karena pengembangan sekolah dewasa itu membutuhkan banyak guru, maka tahun 1852 dibuka sekolah pendidikan guru (*teachers' schools*) yang dikenal dengan nama *Kweekschool* di Surakarta. Yang boleh di *Kweekschool* hanya anak para bangsawan (Djumhur & Danasuparta, 1976).²⁹

Sekolah guru dipimpin kepala sekolah (*headmaster of the teachers' schools*) yang berkebangsaan Belanda dan kedudukannya diangkat resmi pemerintah Belanda dengan sebutan *Director*.³⁰ Para kepala Sekolah ini menjalankan tiga fungsi utama. Disamping melatih guru-guru, juga melatih tenaga administratif, serta kursus untuk penginterpretasikan bahasa daerah dengan bahasa Belanda.³¹

Kedudukan kepala sekolah dewasa itu cukup bergengsi, selain dijabat oleh orang Belanda juga pribumi yang mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat. Untuk menghargai kedudukan itu, pada 1878 didirikan *Chiefs' Schools* di Bandung, Magelang, Probolinggo, dan Tondano bagi anak-anak kepala sekolah dan masyarakat terkemuka lain. Lulusan sekolah ini

²⁹ Kweekschool didirikan pula di Magelang, 1875; Bandung, 1866; Probolinggo, 1875; Tondano, 1873; Amboina, 1974; Banjarmasin, 1875; Makasar, 1876; dan Padang Sidempuan, 1879 (Kroeskamp, 1974:364). Menurut Tilaar (1995:31-40) pendidikan Belanda memiliki lima ciri: (1) model dualisme yang menekankan deskriminatif dan elitisme antara bangsa Eropa dan pribumi; (2) model konkordansi yang disesuaikan dengan model Belanda; (3) bersifat sentralisasi; (4) menghambat gerakan nasional, dan (5) perguruan swasta yang militan.

³⁰ Menurut H. Asnan Ghazali (78 tahun)—kelahiran Malang, lulusan *Volkschool* Malang, mantan tentara PETA, pensiunan Serma TNI, dan salah seorang pendiri Universitas Muhammadiyah Malang—kepala sekolah *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) di kota Malang disebut *Hoofderschool* yang kebanyakan dijabat oleh orang Belanda, sedangkan kepala sekolah *Volkschool* dan *Twede Klasse School* disebut Mantri Guru yang kebanyakan dijabat oleh pribumi terkemuka. Untuk tingkat yang lebih tinggi, seperti *Ambachis School* atau *Landbouw Onderwijs* disebut *Directeur*. Para kepala sekolah ini dipercaya memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai (*bevoegd*).

³¹ Kroeskamp, H. *Early Schoolmasters in A Developing Country: A History of Experiments in School Education in 19th Century Indonesia*. Assen, (The Netherlads: Van Gorcum & Comp. B.V, 1974), 366.

diorientasikan untuk menduduki jabatan pemerintahan dan atau dipersiapkan menjadi kepala sekolah setelah memperoleh pelatihan dan pendidikan yang memadai.³²

Selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda, berkembang pula sekolah yang dikembangkan secara perseorangan maupun organisasi oleh bumiputera. Bentuk persekolahan yang dirintis oleh bumiputera umumnya mengadopsi model persekolahan yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda.³³

Gerakan pendidikan bumiputera yang dirintis oleh Raden Ajeng Kartini (1817-1904), Rd. Dewi Sartika (1884-1947), dan Rohana Kudus (1884-1969) merupakan usaha perorangan ini berperan langsung sebagai guru sekaligus model persekolahan.³⁴ Para pendiri sekolah ini berperan langsung sebagai guru sekaligus pimpinan sekolahnya. Sedangkan Budi Utomo (lahir 1908), Muhammadiyah (lahir 1912), dan Taman Siswa (lahir 1922)³⁵ merupakan organisasi pendidikan bumiputera yang mengadopsi model persekolahan (Dewantara, 1977; Shaeffer, 1979; Tilaar, 1995) termasuk pola kepemimpinan kepala sekolahnya yang diangkat secara resmi (*official leader*) oleh organisasi dan memperoleh pengesahan dari pemerintah Belanda.

³² Kroeskamp, H, *Early Schoolmasters in A Developing Country: A History of Experiments in School Education in 19th Century Indonesia*. Assen, (The Netherlands: Van Gorcum & Comp. B.V., 1974), 384-386.

³³ Wertheim, W.F, *Snouck Hurgronje: Etika Sosial dalam Perubahan*. Terjemahan Oleh Hamid Al-Gadri. (Jakarta:Hami Masagung, 1981).

³⁴ RA Kartini dan Rd. Dewi Sartika mengembangkan pendidikan di Jawa, sedangkan Rohana Kudus mengembangkan di Sumatra. Ketiga tokoh pendidikan ini bergerak dalam bidang pendidikan kaum wanita di Indonesia.

³⁵ Budi Utomo dan Taman Siswa mengembangkan pendidikan sekolah umum sebagaimana pemerintah Belanda, sedangkan Muhammadiyah selain mengembangkan sekolah-sekolah umum juga sekolah-sekolah agama. Gerakan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ini banyak diikuti organisasi Islam lainnya seperti Jami'at al-Khair, Al-Irsyad, Persatuan Umat Islam (PUI), Mathla'ul Anwar, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, dan yang lainnya. Dewasa itu, penyebutan kepala sekolah pada usaha pendidikan bumi putera cukup beragam, seperti Taman Siswa menyebutnya *Ki (Pamong)*, pada Jami'at al-Khair disebut *Syekh* atau *Habib*, Al-Irsyad menyebut *Ustadz*, Nahdlatul Ulama dan Al-Wasliyah menyebut *Syekh* atau *Kyai*, sedangkan Muhammadiyah, PUI dan Mathla'ul Anwar menyebutnya *Ustadz* atau *Pak Kepala*. Gerakan organisasi Islam tidak selalu mengikuti kebijakan pemerintah Belanda, terutama yang berlatar Islam tradisional cenderung mandiri dan tidak mengikuti ketentuan Belanda. Oleh karena itu pengangkatan kepala sekolah sangat tergantung kewenangan kyai berdasarkan tinggi-rendahnya pemahaman keagamaan.

Model Madrasah (Awal Abad 20)

Menurut Peacock (1978) dan Wertheim (1981) pada awal abad 20, sebagian pendidik agama yang semula mengharamkan pola dan gaya sekolah--sebab dianggap sebagai "model pendidikan kafir"³⁶--telah berubah pandangan dengan mendirikan madrasah³⁷ yang kurikulumnya diderivasi dari ajaran agama, tetapi model pengelolaannya dilakukan dalam bentuk klasikal yang mengadopsi model persekolahan.³⁸ Meskipun modelnya seperti sekolah, namun kedudukan kepala madrasah bukan didasarkan pada pengangkatan, melainkan dipilih berdasarkan kemampuan pemahaman keagamaan.

Perubahan orientasi pendidikan Islam dewasa itu telah menimbulkan tiga polarisasi dari perkembangan pendidikan Islam di Jawa, yang pada waktu itu berpusat di pesantren-pesantren. Pertama, timbulnya pesantren *salafi* yang mempertahankan pendidikan agama secara tradisional dengan menolak model persekolahan. Kepemimpinan pendidikan yang bersifat *salafi* dan dikepalai oleh Syekh atau Kyai.³⁹

Kedua, pesantren *khalafi* yang kurikulumnya memuat mata pelajaran agama dan umum. Pesantren ini juga membuka madrasah dan sekolah umum. Para kyai pengasuh pondok biasanya menjadi pimpinan pondok pesantren, sedangkan madrasah dan sekolah umum dipimpin oleh kepala sekolah yang diangkat berdasar kriteria akademik.⁴⁰

³⁶ Djajadiningrat, P.A.A. (1956). Model Pendidikan Belanda. Terjemahan oleh S. Kartodirdjo. Djogjakarta: Tanpa Penerbit.

³⁷ Madrasah berasal dari bahasa Arab *darasa* atau *darrasa* yang berarti belajar (Nasution dkk, 1992) atau tempat belajar (Al-Habsyi, 1985), khususnya sekolah agama yang mempelajari pengetahuan Islam (Gibb & Kramers dikutip Furchan, 1993).

³⁸ Menurut Yunus (1983) pendidikan Islam di Indonesia yang pertama kali mengadopsi model persekolahan adalah *Adabiah School* di Padang, didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Sedangkan menurut Steenbrink (1986), pelopor pembaharuan pendidikan madrasah di Indonesia adalah madrasah Mamba'ul Ulum yang didirikan Susuhunan Pakubuwono di Surakarta pada tahun 1906. Pada madrasah bermodel sekolah ini, sebutan kepala sekolahnya adalah *Syekh* atau *Kyai* sebagai delar kehormatan bagi apra ulama yang tinggi pemahaman keagamaannya, sedangkan guru disebut *Ustadz*.

³⁹ Pendidikan Islam yang bersifat *salafi* masih kuat pengaruhnya hingga sekarang, di daerah Malang ditemukan sejumlah pesantren *salafi* seperti PIQ Singosari, Gading Kasri, Darul Hadits, Begawan-Jabung, Gampingan-Pagak, Slatri Kasembon, dan sebagainya (Depag Kabupaten Malang, 1994).

⁴⁰ Pesantren *khalafi* yang besar di Malang, antara lain: Baiturrohman-Blimbing, Babadan-Kedung Kandang, Nurul Ulum-Sukun, Curah Ampel-Pakis, Sukolilo-Jabung, dan sebagainya.

Ketiga, berkembangnya madrasah dan sekolah Islam yang terlepas sama sekali dari pesantren. Pendidikan madrasah yang awalnya dirintis oleh organisasi Islam reformis ini cenderung mengikuti kebijakan pemerintah termasuk pengesahan kepala sekolahnya. Dalam perkembangan berikutnya, kepemimpinan pendidikan madrasah ini sama dengan sekolah umum yang ada dewasa itu.⁴¹

Dengan munculnya fenomena kepala sekolah di kalangan pendidik Islam, maka terjadi reduksi dan desakralisasi dari eksistensi pemimpin pendidikan. Berbeda dengan seorang kyai sebagai pemimpin pendidikan pesantren, seorang kepala sekolah tidak dituntut memiliki karisma, kekuatan mistis, kejelasan jalur nasab, dan kedalaman ilmu agama. Selain itu, seorang kepala sekolah mempertanggungjawabkan prestasi kerjanya kepada atasan dan warga madrasah yang dipimpinnya, sedangkan kepemimpinan kyai mempertanggungjawabkan prestasi kerjanya kepada Tuhan dan masyarakat luas.

Perbedaan peran dan tanggungjawab kepemimpinan ini menempatkan kepala sekolah sebagai *formal leader*, sedangkan kyai tergolong sebagai *informal leader*. Bergesernya kepemimpinan kyai yang digantikan kedudukannya oleh kepala sekolah pada madrasah atau sekolah Islam tidak terlepas dari pengaruh *schooling system* yang telah diterapkan oleh pemerintah Belanda.

Model Kokumin Gakko (Zaman Jepang)

Ketika pemerintah pendudukan Jepang berkuasa, 8 Maret 1942, berbagai jenis sekolah dasar yang ada pada zaman kolonial Belanda dilebur dan disatukan dengan nama *Kokumin Gakko* (Sekolah Rakyat) yang dibuka pada 29 April 1942.⁴² Sekolah-sekolah statusnya dinegerikan dengan kepala sekolah yang diisi oleh orang-orang Jepang.⁴³ Menurut Benda (1958) penempatan kepala sekolah berkebangsaan Jepang pada sekolah-sekolah rakyat telah memudahkan pemerintah penduduk Jepang dalam menjalankan Nipponisasi, kecuali terhadap sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi-

⁴¹ Menurut Furchan (1993) dampak dari perubahan ini, pendidikan muslim di Indonesia terpecah menjadi dua kelompok yaitu pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah Islam (*religiously*), dan sekolah yang mengikuti secara total model pendidikan Western-secular (*nonreligiously*). Berkaitan dengan MI dan SDI yang cukup terkenal di Malang, antara lain: MIN Malang I, MI Jendral Sudirman-Sumbersari, SDI Sabilillah, dan sebagainya (Depag Kodya, 1995; Depag Kab. Malang, 1995).

⁴² Sekolah-sekolah di kota Malang dengan cepat mengikuti perubahan yang dilakukan pemerintah Jepang. *Kokumin Gakko* diselenggarakan di seluruh bekas Sekolah Dasar di zaman kolonial Belanda yang ada di Malang (Asmadi, 1985).

⁴³ Menurut H. Asnan Ghazali (78 tahun), kepala sekolah dewasa itu disebut *Gakkocho* atau *Gakkooyoo*.

organisasi Islam maupun pesantren-pesantren.⁴⁴ Meskipun demikian, sekolah-sekolah Islam gaya Barat tidak cukup kuat untuk menyelamatkan diri dari gelombang Japanisasi. Sebaliknya, sekolah-sekolah Islam yang mempunyai basis kuat di pesantren, tetap selamat dari gelombang Japanisasi.⁴⁵

Model Pengajaran Nasional (Zaman Kemerdekaan)

Setelah Republik Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, kedudukan pendidikan mendapat prioritas utama. Hal itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke empat, bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah menderdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut dipertegas dalam UUD 1945 pasal 31 tentang Hal Pendidikan bahwa: (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran; dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu model pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.

Realisasi pertama dari amanat UUD 1945 ini terlihat dari instruksi umum yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan/Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) pertama, Ki Hajar Dewantara kepada kepala sekolah⁴⁶ dan guru agar membuang model pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme, nasionalisme, dan demokratis (Tilaar, 1995; Nasution, 1987). Semangat patriotisme pada masa permulaan revolusi fisik dalam mempertahankan negara dari penjajahan dewasa itu menyebabkan kepala sekolah dan guru turut menyokong dalam pembentukan Ikatan Pelajar Indonesia (IPI).⁴⁷

Peralihan pemerintahan dari Jepang ke Pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya berdampak pada dunia pendidikan yang dewasa itu dalam waktu bersamaan membutuhkan ribuan kepala sekolah untuk

⁴⁴ Menurut surat kabar *Asia Raya*, 17 Juni 1943 (dikutip Asmadi, 1985) diberitakan bahwa di Blitar telah dinegerikan satu sekolah Katholik dan dua sekolah Taman Siswa. Namun, diberitakan pula bahwa pemerintah militer Jepang menyatakan bahwa sekolah Muhammadiyah di Blitar dibiarkan sebagai sekolah swasta karena dikhususkan untuk mengajarkan agama Islam. Untuk mengawasi pendidikan swasta ditetapkan peraturan *Osamu Seirei* No. 22 tertanggal 1 Juli 1943. Peraturan ini memberi kewenangan pengawas sekolah di kantor-kantor kabupaten untuk memveto kurikulum dan memecat guru di sekolah-sekolah swasta yang diawasinya apabila menyimpang.

⁴⁵ Benda, H.J, *The Crescent and Rising Sun: Indonesia Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*, (Den Haaq: NV. Uitgeverij W. van Hove, 1958).

⁴⁶ Sejak Indonesia merdeka, penggunaan istilah kepala sekolah diberlakukan sampai sekarang.

⁴⁷ IPI berkembang menjadi BKR Pelajar, TKR Pelajar, dan TRIP. Di Kota Malang diselenggarakan Kongres Pelajar, 14-16 Juli 1946 dengan terbentuknya kesatuan TRIP Jatim yang bemarkas di Malang.

menggantikan kepala sekolah yang semula berkebangsaan Jepang.⁴⁸ Kebutuhan kepala sekolah yang mendesak ini dilakukan pemerintah secara konvensional dengan memilih guru senior sebagai kepala sekolah tanpa prosedur yang rumit. Proses pengangkatan kepala sekolah ini selain terdorong kebutuhan juga dilatari oleh model pengangkatan kepala sekolah yang dilakukan pada masa pemerintah Belanda yaitu berdasarkan senioritas.⁴⁹ Proses pengangkatan kepala sekolah ini berjalan terus dan menjadi konvensi formal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam hal pengangkatan kepala sekolah.

Munculnya konflik politik pada tahun 1950-an sampai 1960-an diikuti dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan yang lebih diprioritaskan seperti pengadaan SD dan pengangkatan guru, menyebabkan kedudukan kepala sekolah kurang memperoleh perhatian khusus dan berjalan secara alami. Lahirnya Undang-Undang No. 4/1950 sampai Undang-Undang No. 2/1989 tentang Pendidikan juga belum ditemukan pasal yang mengatur secara khusus tentang kekepalasekolahan, kecuali deskripsi tugas dan tanggungjawab kepala sekolah.

Lahirnya jurusan Administrasi Pendidikan⁵⁰ di sejumlah FKIP pada tahun 1960-an yang bertujuan membekali lulusannya untuk mampu

⁴⁸ Usana pendidikan yang dimotori pribumi ketika masa Belanda dan Jepang telah menjadi kekuatan pendidikan nasional (*national educational capability*) manakala kebutuhan kepala sekolah pada waktu itu harus dipenuhi (Bukhori, 1994).

⁴⁹ Pengaruh model pemerintahan Belanda dalam pengangkatan kepala sekolah ini lazim terjadi dewasa itu, sebab Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri PP dan K yang pertama, memiliki latar pendidikan Belanda (Eropa), ia alumnus ELS dan pernah sekolah di Stovia (Djumhur & Danasuparta, 1976:169). Menurut Prof. Dr. T. Raka Joni, M.Sc (60 tahun)--beliau pernah kuliah di State University College at buffalo, New York dan melakukan studi banding ke Malaysia, Jerman Barat, Inggris, Kopenhagen-Denmark, Australia, Mexico, Kanada, dan Amerika Serikat--model pengangkatan kepala sekolah yang didasarkan pada senioritas guru merupakan model yang berlangsung di Eropa Daratan, termasuk Inggris, pernyataan ini dibenarkan oleh Frans Mataheru, Dip.Ed.Ad., Ed.D. (58 tahun), yang menempuh Diploma Administrasi Pendidikan (jenjang S2) pada Institute of Education, Leeds University di Inggris. Sebaliknya, menurut Prof. Dr. T. Raka Joni, M.Sc bahwa model pengangkatan kepala sekolah di Amerika selain mempertimbangkan unsur senioritas juga mempersyaratkan kompetensi kekepalasekolahan, hal ini juga dibenarkan oleh Ahmad Sonhadji KH, M.A., Ph.D (53 tahun), yang menempuh pendidikan doktornya di Ohio State University, bahwa kepala sekolah di Amerika dipersyaratkan menempuh pendidikan tertentu dan diharuskan memiliki *certificate of principalship*.

⁵⁰ Menurut Frans Mataheru, Dip.Ed.Ad., Ed.D. disiplin ini berkembang di Indonesia menjelang pertengahan tahun 1960-an, di FKIP Universitas Airlangga cabang Malang, yang--sejak 3 Januari 1963 sampai sekarang (Djojonegoro, 1995:150)--menjadi IKIP Malang, bidang ini muncul sekitar tahun 1964-1965 dengan

melaksanakan tugas-tugas kekepalasekolahan ternyata tidak mempengaruhi konvensi dan kebijakan yang berlaku. Sampai saat ini, pengangkatan kepala sekolah di sekolah dasar tetap masih didasarkan atas Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) atau senioritas yaitu memiliki sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman mengajar.⁵¹ Kebijakan ini diberlakukan mengingat jumlah sekolah dasar yang ada cukup besar⁵² dan penyebarannya memiliki disparitas kualitas daerah yang berbeda pula, serta dikuatirkan calon kepala sekolah yang hanya dibekali pendidikan tanpa diiringi pengalaman lapangan akan banyak menemui kendala di lapangan.

Untuk menjabatani kelemahan calon kepala sekolah yang terakhir ini pemerintah mengiringi kebijakan pengangkatan kepala sekolah dengan syarat-syarat tertentu seperti besar kecilnya pembinaan yang pernah diterima oleh calon kepala sekolah melalui penataran, kunjungan sekolah, pembinaan profesional, dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS). Selain pertimbangan-pertimbangan dari atas, dalam pengangkatan kepala sekolah nampaknya juga berpengaruh dan atau perlu diperhatikan penerimaan guru-guru yang akan dipimpin oleh kepala sekolah yang akan diangkat tersebut. Pertimbangan yang terakhir ini seringkali terabaikan sehingga ada sebagian kepala sekolah yang ketika ditempatkan di sekolah kurang memperoleh dukungan dari para guru.

Jabatan kepala sekolah di Indonesia, terutama kepala sekolah di sekolah dasar belum sepenuhnya dikaitkan dengan keahlian dan latar

nama Ketatalaksanaan Pendidikan, yang muncul bersama dengan program Didaktik dan Kurikulum (sekarang menjadi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan), Pendidikan Sosial (sekarang menjadi Pendidikan Luar Sekolah), Bimbingan dan Penyuluhan (sekarang menjadi Psikologi Pendidikan dan bimbingan), Teori dan Filsafat Pendidikan (sekarang hanya menjadi bidang studi Filsafat Pendidikan). Program Ketatalaksanaan Pendidikan ini menjelang tahun 1970-an berubah menjadi Administrasi dan Supervisi Pendidikan (ASP), dan sekarang menjadi jurusan Administrasi Pendidikan (AP) yang diselenggarakan di IKIP Malang dan sejumlah IKIP dan Universitas lainnya.

⁵¹ Mekanisme dan tatacara mengidentifikasi kepala SD ini dilakukan oleh pengawas TK, SD, dan SDLB guna diajukan pada Kakadepcam untuk diusulkan dan bekerjasama dengan Kacab Dinas P dan K, yang selanjutnya digodok bersama-sama dengan Kepala Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk kepala MI dilakukan oleh pengawas RA, MI dan langsung dikoordinasi oleh Kasi Pergurais Depag guna ditetapkan oleh Kakandepag Kotamadya/Kabupaten. Proses pengangkatan ini di MI Swasta, seringkali terabaikan sebab mekanismenya dilakukan oleh Yayasan berdasarkan musyawarah, bahkan ditemukan sejumlah MI Swasta dalam mengangkat kepala MI dipengaruhiaspek religio-feodalisme.

⁵² Menurut data PEQIP tahun 1993 (dikutip Tilaar, 1995:190) tercatat kurang lebih 111.906 SD yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah murid sekitar 29,5 juta.

pendidikan khusus, termasuk tidak adanya pembatasan masa jabatan kepala sekolah.⁵³ Ketentuan ini terdapat dalam Surat Keputusan Mendikbud Nomor 085/U/1994 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah, bab II, pasal 3, ayat 3 yang menyebutkan bahwa seorang calon kepala sekolah dasar dipersyaratkan berijazah serendah-rendahnya SPG jurusan SD atau yang sederajat dan berpengalaman mengajar di SD sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi CPNS. Persyaratan ini pada dasarnya bersifat umum bagi semua guru dan tidak secara khusus menegaskan adanya pendidikan khusus kekepalasekolahan. Oleh karena itu, wajar apabila sampai saat ini belum ada lembaga pendidikan prajabatan yang secara khusus mempersiapkan lulusannya langsung dapat menduduki jabatan kepala sekolah.

Surat Keputusan Mendikbud di atas selanjutnya diperbarui dengan Surat Keputusan Mendikbud No. 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS sebagai kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁵⁴ Dalam keputusan ini persyaratan umum dan khusus sama dengan keputusan sebelumnya. Perbedaannya terdapat pasal yang mengatur masa tugas. Kepala sekolah diberi satu masa tugas selama 4 (empat) tahun (pasal 5, ayat 1). Masa tugas ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas (pasal 5, ayat 2), sedangkan guru yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugasi kembali menjadi kepala sekolah apabila: (a) telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau (b) memiliki prestasi sangat baik, dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain (pasal 5, ayat 3), Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru.

Lahirnya SK Mendikbud ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain: (1) prestasi kepala sekolah dapat dinilai sehingga personel yang ditugasi sebagai kepala sekolah dapat dirotasi secara

⁵³ Masa Jabatan kepala sekolah SD yang bersifat "konvensional" dengan tidak adanya pembatasan waktu ini menjadi dasar bagi lahirnya Surat Keputusan Menpan RI No. 84/1993 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0296/U/1996.

⁵⁴ Menurut Prof. Drs. Zaenal Arifin Achmady, M.P.A. (Dirjen Dikdasmen) dasar pemikiran yang melatari lahirnya SK Mendikbud ini adalah hasil evaluasi Tim Ditjen Dikdasmen yang melihat jabatan kepala sekolah berlangsung seumur hidup sejak masa kemerdekaan sampai sekarang. Tiada batasan masa jabatan ini sering membuat para kepala sekolah kehilangan motivasi. Dengan adanya pembatasan ini, Kepsek dituntut untuk bermotivasi maupun berdaya kreasi tinggi jika ingin berhasil dan terpilih kembali untuk masa kedua kalinya atau dipromosikan menjadi pemilik. Ide ini diadopsi dari model jabatan rektor atau dekan di perguruan tinggi (Surabaya Post, 8 Maret 1994).

teratur; (2) adanya pembatasan masa jabatan menuntut kepala sekolah untuk bermotivasi dan berkreasi tinggi jika ingin dipilih kembali; (3) adanya inovasi baru dalam jabatan kepala sekolah yang semula bersifat struktural menjadi jabatan yang bersifat fungsional; (4) berfungsinya Dewan Guru yang berarti teralihnya posisi kepala sekolah yang semula bersifat birokratik mengarah ke hubungan yang bersifat kolegial-akademik; dan (5) lebih panjangnya masa kerja kepala sekolah--sebagai pejabat struktural--yang semula harus pensiun pada usia 55 tahun, akan diperpanjang usia 60 tahun karena menduduki jabatan fungsional. Sedangkan dampak negatifnya antara lain: (1) pembatasan masa jabatan selama 4 tahun merupakan hal sulit bagi kepala sekolah untuk meningkatkan prestasinya, selama kebijakan ini tidak diikuti pembinaan dan peningkatan kemampuan kepala sekolah secara sistematis seperti yang ada di lingkungan ABRI; (2) pembatasan masa jabatan kepala sekolah seperti jabatan Dekan atau Rektor perguruan tinggi membutuhkan kesiapan mental para kepala sekolah yang belum terujikan; (3) mantan kepala sekolah yang habis masa jabatannya dan menjadi guru biasa akan menanggung beban mental yang lebih berat dibandingkan dengan jabatan mantan rektor atau dekan yang beralih menjadi dosen biasa.

Model Pengajaran Kontekstual

Model kontekstual ini didasarkan pada hasil penelitian John Dewey (1916) yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui melalui kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Model Pembelajaran ini menekankan pada daya pikir yang tinggi, transfer ilmu pengetahuan, mengumpulkan dan menganalisis data, memecahkan masalah-masalah tertentu baik secara individu maupun kelompok. Dalam model ini, guru dituntut memberikan kegiatan yang bervariasi, sebagai manifestasi strategi pembelajaran kontekstual⁵⁵, sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa, mengaktifkan siswa, dan guru mendorong berkembangnya kemampuan baru, menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah, rumah dan lingkungan masyarakat. Pada akhirnya siswa memiliki motivasi tinggi untuk belajar. Dengan menggunakan pola evaluasi portofolio, pola assessment, tes-tes dan ulangan-ulangan yang cognitive-based, diharapkan para guru mampu melakukan perubahan, lompatan, dalam proses peningkatan kegiatan belajar mengajarnya.

⁵⁵ Menurut Prof. Suyanto, Ph.D., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, "Guru harus selalu diajak untuk berubah dengan cara dilatih secara kontinu dalam pembuatan satuan pelajaran, metode pembelajarannya yang berbasis Inquiry, Discovery, Kontekstual Teaching and Learning, menggunakan alat bantu, menyusun evaluasinya, dan perubahan filosofinya, dan sebagainya untuk persiapan aktualisasi model pengajaran kontekstual.

Strategi pengajaran kontekstual yang perlu dikembangkan guru antara lain, **Pertama**, pembelajaran berbasis masalah; Sebelum memulai proses belajar-mengajar di kelas, siswa terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu dan siswa diminta untuk mencatat permasalahan-permasalahan yang muncul. Di sini guru merangsang siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada serta mengarahkan siswa bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan perspektif yang berbeda dengan mereka. **Kedua**, memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar; guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan siswa misalnya, di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakatnya serta penugasan siswa untuk belajar di luar kelas. **Ketiga**, memberikan aktivitas kelompok; Aktivitas belajar secara kelompok dapat memperluas perspektif serta membangun kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Guru dapat menyusun kelompok terdiri dari tiga, lima, maupun delapan siswa sesuai dengan tingkat kesulitan penugasan. **Keempat**, membuat aktivitas belajar mandiri; Peserta didik diarahkan untuk mencari, menganalisis dan menggunakan informasi dengan sedikit atau bahkan tanpa bantuan guru. Pengalaman pembelajaran kontekstual harus mengikuti uji coba terlebih dahulu; menyediakan waktu yang cukup, dan menyusun refleksi; serta berusaha tanpa meminta bantuan guru supaya dapat melakukan proses pembelajaran secara mandiri (independent learning). **Kelima**, membuat aktivitas belajar bekerja sama dengan masyarakat; sekolah dapat melakukan kerja sama dengan institusi pemerintah/swasta dan orang tua siswa yang memiliki keahlian khusus untuk menjadi guru tamu. Hal ini perlu dilakukan guna memberikan pengalaman belajar secara langsung di mana siswa dapat termotivasi untuk mengajukan pertanyaan. **Keenam**, menerapkan penilaian autentik; Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian autentik dapat membantu siswa untuk menerapkan informasi akademik dan kecakapan yang telah diperoleh pada situasi nyata untuk tujuan tertentu. Menurut Johnson (2002:165), penilaian autentik memberikan kesempatan luas bagi siswa untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama proses belajar-mengajar. Adapun bentuk-bentuk penilaian yang dapat digunakan oleh guru adalah portofolio, tugas kelompok, demonstrasi, dan laporan tertulis. Sebagai penjabarannya antara lain, portofolio; merupakan kumpulan tugas yang dikerjakan siswa dalam konteks belajar di kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan untuk mengerjakan tugas tersebut supaya lebih kreatif. Mereka memperoleh kebebasan dalam belajar sekaligus memberikan kesempatan luas untuk berkembang serta memotivasi siswa. Penilaian ini tidak perlu mendapatkan penilaian angka, melainkan melihat pada proses siswa sebagai pembelajaran aktif. Sebagai contoh, siswa diminta untuk melakukan survei mengenai jenis-jenis pekerjaan di lingkungan rumahnya. Tugas kelompok; dalam pembelajaran kontekstual berbentuk pengerjaan proyek. Kegiatan ini merupakan cara untuk mencapai tujuan akademik sambil mengakomodasi perbedaan gaya belajar, minat, serta bakat dari masing-masing siswa, sejak

dari proyek akademik terkait dengan konteks kehidupan nyata, oleh karena itu tugas ini dapat meningkatkan partisipasi siswa. Sebagai contoh, siswa diminta membentuk kelompok proyek untuk menyelidiki penyebab pencemaran sungai di lingkungan siswa. Demonstrasi, siswa diminta menampilkan hasil penugasan kepada orang lain mengenai kompetensi yang telah mereka kuasai. Para penonton dapat memberikan evaluasi pertunjukkan siswa. Sebagai contoh, siswa diminta membentuk kelompok untuk membuat naskah drama dan mementaskannya dalam pertunjukan drama. Menurut Brooks & Brokks dalam Johnson (2002:172), bentuk penilaian seperti ini lebih baik dari pada menghafalkan teks, siswa dituntut untuk menggunakan keterampilan berpikir yang lebih tinggi guna membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui quantum teaching, siswa diajak memperhatikan fungsi kerja otak kiri dan kanan dan emosi, Dengan demikian, guru diharapkan paham hal mendasar menyangkut prinsip belajar otak kiri dan kanan, pendekatan Quantum Teaching and Learning, pemahaman tentang Multiple Intelligences dan penerapannya di kelas, Taksonomi Bloom dan aplikasinya pada proses belajar mengajar. Metode pengajaran Kontekstual Teaching and Learning, mengakses dan memanfaatkan internet sebagai wahana belajar, mengorkestrasikan materi yang diajarakannya dengan materi pelajaran lain. Guru sebagai pelaksana kurikulum diharap dapat menerapkan strategi pembelajaran kontekstual supaya dapat memberikan bentuk pengalaman belajar. Dan strategi pembelajaran yang memiliki banyak variasi sehingga memungkinkan guru untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran yang berbeda dan menarik untuk lebih mengembangkan daya pikir siswa ke arah yang produktif berpikir.

Penutup

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa secara epistemologis model pendidikan di Indonesia di bangun mula-mula berangkat dari model per-*cantrik*-an, yaitu model pendidikan *individual antar personal*, dengan menempatkan pendidik (*resi, master, ustadz*) sebagai guru sekaligus pemimpin spiritual secara individu. **Kedua**, model *padhepokan* yaitu model *guru-kula*. **Ketiga**, model pesantren, hasil inspirasi model persaudaraan *Sufi, Kuttab, Ribat*, dan *Hankah* yang dikombinasi dengan model pendidikan *guru-kula* yang diberi corak ke-Islam-an. **Keempat**, model persekolahan (*schooling system*), model yang mengacu pada desakralisasi peran pimpinan lembaga pendidikan. Dimana seorang kepala sekolah, *Directeur, Hoofderschool, Manteri Guru*, Head Master, Dekan dan Rektor, menduduki jabatan ini hanya disyaratkan mempunyai pengetahuan ilmu pendidikan plus pengetahuan manajerial tentang pengelolaan sekolah, tidak sebagaimana pada model *guru-kula* di pesantren (*emerging leader*) yang harus disertai moral tinggi dan *akhlaqul karimah*. **Kelima**, model madrasah, model kombinasi antara model sekolah umum dengan model pesantren, pelajarannya materi umum yang bermuatan nilai-nilai agama Islam. Model ini

pada akhirnya berkembang membentuk sekolah Islam independen. **Keenam**, model dainippon Jepang, model ini merupakan instrumen doktrin *nipponisasi-radikal*, dengan mengganti seluruh kepala sekolah (*Gakkoochoo*) yang ada dengan orang Jepang, kecuali sekolah-sekolah swasta yang dikelola organisasi Islam dan pesantren.

Daftar Rujukan

Goldziher, Ignas, *What is Meant by Jahiliyyah*, Chicago : al-Dine, 1966.

Kahalla, Umar, *A'lam al-Nisa' fii A'lamay al-Araby wa al-Islam*, Bairut : Al-Muassasah al-Risalah, 1902.

Mernisi, Fatimah, *The Forgotten queens of Islam*. Bloominton : Polity Press and Blackueell Plubiser, 1993.

Rasyad, Iswadi, *Medieval History of India*, Delhi : TP, 1908.

Tayfur, Imam Ibnu Thahir, *Balaghat al-Nisa'* , Bairut : Daar al Nahdhah al-Hadis, 1972.

Al-Tabari, 1979, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Bairut : Daar al-Fikr, 1979.

Zarkaly, A'lam.,1958, *Syiar al-A'lam al-Nubala'* , Kairo : Daar al-Ma'arif, 1958.